

## BAB. I

### PENGANTAR

#### A. Latar Belakang

Sebelum terbentuknya daerah otonom Sulawesi Tengah, kekuasaan pemerintahan masih dipegang oleh raja-raja yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa itu merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan, terdiri dari Tujuh Kerajaan di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan di wilayah Barat, dan raja-raja ini mempunyai daerah dan kekuasaan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya perkembangan sistem pemerintahan kerajaan dan hubungan sosial ekonomi (perdagangan), maka kerajaan-kerajaan ini perlahan-lahan mendapat pengaruh dari luar, antara lain dari kerajaan Bone, Gowa, Luwu, Mandar dan Ternate. Bahkan pada akhir abad XIX kerajaan di Wilayah Sulawesi Tengah sudah ada yang menjalin hubungan dengan luar negeri seperti Portugis, Spanyol dan VOC (Belanda).<sup>1</sup>

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan Di wilayah Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan *Landschap-landschap* atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda.<sup>2</sup>

Pada mulanya hubungan tersebut masih bersifat lunak dalam bentuk hubungan persahabatan dagang, tetapi lama kelamaan hubungan tersebut makin mengikat dengan berbagai perjanjian. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menaklukkan sebagian raja-raja di Sulawesi Tengah. Bahkan raja yang

---

<sup>1</sup> Haryanto Djalumang, 2012. *Sejarah Singkat Sulawesi Tengah*.

<sup>2</sup> Jurnal Dishut Sulteng. 2012 *Profil Sulawesi Tengah*.

tidak mau tunduk dibawah kekuasaannya dipaksa melalui peperangan. Pada zaman pemerintahan Belanda awal abad XX pulau Sulawesi dibagi atas dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar dan Sulawesi Utara dengan ibukota Manado. Setiap provinsi dibagi menjadi afdeling dan setiap afdeling dibagi menjadi onder afdeling serta setiap onder afdeling terdiri dari beberapa kerajaan.<sup>3</sup>

Dengan datangnya pemerintahan Jepang tahun 1942 di Sulawesi Tengah praktis berlaku administrasi pemerintahan militer yang tidak jauh beda dengan Belanda. Dari organisasi dan para raja inilah timbul ide untuk membentuk daerah otonom Sulawesi Tengah. Pada tahun 1949 lima belas orang raja yang memerintah di 15 kerajaan di Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan di Tentena untuk membicarakan perlunya dibentuk daerah otonom Sulawesi Tengah yang wilayahnya terdiri dari 15 kerajaan tersebut.<sup>4</sup>

Sebagai koordinator/ketua dari 15 dewan raja tersebut dipilih R. M. Pusadan yang juga sebagai Kepala Daerah Otonom dengan ibu kota Poso. Pemerintahan dewan raja ini hanya berlangsung hingga tahun 1950. Melalui PP No. 33 tahun 1952 Sulawesi Tengah yang tadinya hanya satu kabupaten dengan ibukota Poso, dibagi lagi menjadi dua daerah administratif setingkat kabupaten yaitu kabupaten Poso dengan ibukota Poso dibawah pimpinan Kepala Daerah Abdul Latif Daeng Masikki dan Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu di bawah pimpinan

---

<sup>3</sup> Jurnal Dishut Sulteng.2012 *Profil Sulawesi Tengah*.

<sup>4</sup> Jurnal Dishut Sulteng.2012 *Profil Sulawesi Tengah*.

Kepala Daerah Intje Naim Daeng Mamangun. Keadaan kedua Wilayah ini berlangsung hingga tahun 1956.<sup>5</sup>

Pada bulan Juli 1957 Permesta memproklamkan berdirinya Provinsi Sulawesi Utara (melepaskan diri dari Gubernur Sulawesi di Makassar) yang mencakup wilayah Sulawesi Tengah dengan Gubernur H. D. Manoppo. Namun para tokoh masyarakat Sulawesi Tengah dari berbagai aliran dan golongan serta para pemuda tidak setuju dengan tindakan indisipliner Permesta tersebut. Para tokoh yang tergabung dalam GPPST (Gerakan Penuntut Provinsi Sulawesi Tengah) bertekad untuk mempertahankan daerah Sulawesi Tengah serta memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah yang otonom. Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 tahun 1959, Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah yang tadinya hanya membawahi dua kabupaten, dirubah menjadi empat kabupaten.<sup>6</sup>

Sedangkan bekas Kewedanaan Buol yang tadinya masuk wilayah Kabupaten Gorontalo digabungkan ke dalam wilayah daerah Kabupaten Buol Tolitoli tahun 1960. Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU No. 47 tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan ibukota Makassar dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah dengan ibukota Manado. Dalam kurang lebih sepuluh tahun sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Pemerintah Pusat dikenal delapan macam konsepsi. Dari kedelapan konsepsi tersebut yang disetujui dan diterima oleh Pemerintah Pusat adalah "Konsepsi

---

<sup>5</sup> Kelompoktik.2012 *Sulawesi Tengah*.

<sup>6</sup> Dhikalambento.2012 *Sejarah Sulawesi Tengah*.

Mahasiswa Sulawesi Tengah" atau juga dikenal sebagai "Konsepsi Rusdi Roana-Rene Lamakarate". Akhirnya pada tahun 1964 melalui PERPU No. 2 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, yang disahkan dengan UU No. 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964, dan berlaku surut tanggal 1 Januari 1964 (LN No. 64 tahun 1964).<sup>7</sup>

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.<sup>8</sup>

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tuntutan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka tepatnya pada tanggal 3 November 1999 Gubernur Sulawesi Tengah (Brigjen Purn. H.B. Palidju) atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebelumnya masih bernaung bergabung dalam Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi satu kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dhikalambento.2012 *Sejarah Sulawesi Tengah*.

<sup>8</sup> BPK RI, Perwakilan Sulawesi Tengah.2013 *Profil Provinsi Sulawesi Tengah*.

<sup>9</sup> Dhikalambento.2012 *Sejarah Sulawesi Tengah*.

Secara historis wilayah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan mulanya adalah bagian dari Kerajaan Banggai yang sudah dikenal sejak abad 13 Masehi sebagaimana termuat dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Besar Empu Prapanca pada tahun Saka 1478 atau 1365 Masehi.<sup>10</sup>

Banggai Kepulauan merupakan suatu pulau yang terletak di ujung provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.160,46 km (darat) dan 18.828,10 km (laut), Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di sebelah utara, Teluk Tolo di sebelah selatan, Selat Peling di sebelah barat, serta Laut Maluku di sebelah timur. Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian yang terintegrasi dari wilayah Propinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu “Kabupaten Maritim“ yaitu terdiri dari 342 Pulau, dengan rincian 5 Pulau sedang, yang terdiri dari Pulau Peling (luas 2.340 km<sup>2</sup>), Pulau Banggai (268 km<sup>2</sup>), Pulau Bangkurung (145 km<sup>2</sup>), Pulau Salue Besar (84km<sup>2</sup>), Pulau Labobo (80km<sup>2</sup>) dan 337 pulau-pulau kecil.<sup>11</sup>

Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 19 kecamatan yang terbagi menjadi 205 desa, dan 6 kelurahan, yang sebagian besar tersebar di pesisir pantai dan ada juga yang berada di pegunungan.<sup>12</sup>

Sebagai wilayah kepulauan, laut menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang selalu digeluti masyarakat di sana, namun sebagian diantara mereka adalah petani yang merangkap sebagai nelayan, disaat lahan pertanian tidak membutuhkan banyak tenaga, mereka biasanya melaut mencari ikan. Di situ pulalah terdapat potensi dan kekayaan alam yang harus diolah dan diusahakan sebagai penopang

---

<sup>10</sup> Haryanto Djalumang, 2012. *Sejarah Kabupaten Banggai*. Jakarta : Rajawali Press. Hlm 18

<sup>11</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 2011-2014

<sup>12</sup> Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. *Kondisi Demografi Kabupaten Banggai Kepulauan*. 2011

kehidupan penduduk Banggai Kepulauan. Namun ada beberapa wilayah di Banggai Kepulauan yang sangat tergantung pada hasil pertanian diantaranya Desa Sampaka.

Desa Sampaka merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Totikum yang berada di atas dataran tinggi, yang letaknya jauh dari tepi pantai sehingga mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai petani. Perkebunan dan pertanian merupakan sektor pendapatan terbesar di desa Sampaka, selain peternakan, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Namun dalam sektor ini yang menjadi kendala utama adalah sarana dan prasarana di bidang pengembangan produksi pertanian dan ketidaksiannya harga kebutuhan petani dengan harga hasil pertanian.<sup>13</sup>

Kampung Cempaka (Desa Sampaka) terbentuk pada tahun 1891 berasal dari pertemuan 5 (lima) Kelompok masyarakat, antara lain : Kelompok masyarakat Dikot bertempat di Dikot, Kelompok masyarakat Kanggilian bertempat di Kanggilian, Kelompok masyarakat Momolas bertempat di Momolas, Kelompok masyarakat Kuai di Kuai, dan Kelompok masyarakat Bokiki bertempat di Bokiki.<sup>14</sup>

Masing-masing kelompok ini dipimpin oleh salah seorang kepala kelompok yang dinamakan *Tonggal*. Sejak tahun 1891 kepala-kepala kelompok atau *Tonggal* ini bersama anggotanya berkumpul dalam rangka membicarakan tentang tempat tinggal mereka dan menyatuhkan diri menjadi satu kelompok pada saat itu mereka sepakat untuk menyatuhkan tempat tinggal mereka. Pada saat itu

---

<sup>13</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sampaka.2014

<sup>14</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sampaka.2014

diprakarsai oleh 5 (lima) orang pemimpin Kelompok yang merupakan pemerintahan baru pada saat itu disebut *Tonggal* dan selanjutnya disebut *Kapita* atau Kepala Desa. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh salah seorang kepala Kelompok yang dinamakan *Kapita*. Berdasarkan pertemuan antara semua anggota kelompok masyarakat tersebut maka mereka sepakat untuk menetap disuatu tempat yang pada masa itu terdapat banyak tumbuhan bunga Cempaka.<sup>15</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh tentang sejarah desa Sampaka, dan peneliti merasa bertanggung jawab menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Desa Sampaka Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “*Sejarah Desa Sampaka Di Banggai Kepulauan*”

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu dibagi dalam dua bidang penelitian yang mencakup:

### 1. *Scope* Kajian

Kajian Disini menunjukkan pada bidang histori atau yang akan di kaji dalam penulisan ini adalah mengenai Sejarah Desa Sampaka di Banggai Kepulauan pada bidang sosial, ekonomi, tradisi, dan mitos masyarakat.

### 2. *Scope* Spasial

Spasial menunjukkan pada objek penelitian di Desa Sampaka di Banggai Kepulauan dengan adanya batasan tempat ini maka akan lebih muda untuk

---

<sup>15</sup> *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sampaka.2014*

mengetahui gambaran serta mendapatkan data-data penelitian yang sesuai, akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

### 3. *Scope* Temporal

Penulis ingin mengkaji bagaimana sejarah dan perubahan sosial dari Tahun 1977-2014 Desa Sampaka di Banggai Kepulauan.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Bahan-bahan pustaka yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang hampir memiliki kesamaan judul diantaranya :

Buku *Sejarah Kepulauan Maluku* yang ditulis oleh W.R.van Hoewel yang diterjemahkan oleh Harto Juwono yang diterbitkan oleh Penerbit Ombak pada tahun 2014. Dalam buku ini penulis lebih fokus membicarakan masalah atau kisah kedatangan orang-orang Eropa hingga perdagangan rempah-rempah dan penegakan kekuasaan oleh orang-orang Eropa di Maluku. Penulisan buku ini menggunakan pendekatan sosial politik, dalam pemilihan tema penulisan ini dibangun atas pandangan bahwa salah satu bagian penting dalam diri bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam segala aspek, geopolitik, sosial budaya, ekonomi dan lain-lain.

Secara keseluruhan, buku ini memperlihatkan bagaimana perjumpaan budaya, ekonomi dan politik yang terjadi sejak abad ke-16 di Maluku. Bagaimana struktur kekuasaan lama pada kerajaan-kerajaan di Maluku Utara telah digambarkan dalam buku ini, meski tidak begitu memadai menyangkut mekanisme pembentukannya, tetapi beberapa kronologi pergantian, transisi dan



formasi kekuasaan dan goncangan-goncangannya ditulis dengan baik. Tema seperti ini akan selamanya penting karena menyangkut pengetahuan yang tumbuh dari lokalitas Maluku sendiri, sebelum pengaruh asing membongkarnya.<sup>16</sup>

Buku lain yang dijadikan kajian selanjutnya yaitu buku *Sejarah Kabupaten Banggai* yang ditulis oleh Haryanto Djalumang yang diterbitkan oleh Rajawali Pres, Jakarta, pada tahun 2012. Dalam buku ini penulis lebih fokus pada sejarah Kabupaten Banggai, Badan Perjuangan Otonomi Daerah (BPOD) Daerah Swatantra Tingkat II (DASTING) Kabupaten Banggai, serta Visi dan Misi Bupati Banggai 2011-2016.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cara studi yang dilakukan dengan hati-hati, teliti dan sempurna terhadap sejarah kebudayaan Kabupaten Banggai, sehingga dapat dirumuskan dalam sebuah laporan studi berupa buku. Studi yang dilakukan melalui pendekatan dan wawancara kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui persis tentang sejarah dan kebudayaan Kabupaten Banggai, melalui studi Perpustakaan Nasional, LIPI di Jakarta, Manado, Palu, dan Luwuk.

Metode yang dilakukan dalam penulisan buku adalah Metode Survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang bukti sejarah masa lampau Kabupaten Banggai, sedangkan teknik yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan atau nara sumber.

---

<sup>16</sup> Harto Juwono, 2014. *Sejarah Kepulauan Maluku*. Yogyakarta; Penerbit Ombak

Buku ini lebih banyak berbicara tentang pembentukan Kabupaten Banggai dan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Banggai dari awal pembentukan Kabupaten sampai dengan sekarang.<sup>17</sup>

Selanjutnya buku yang dikaji dalam penelitian ini yaitu buku *Sepintas Kilas Sejarah Banggai serta Perlawanan terhadap Penjajah Belanda dan Jepang di Daerah Luwuk Banggai*. Yang ditulis oleh H.S Padeatu, SH. Yang diterbitkan oleh PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2005.

Dalam buku ini hanya dijelaskan sejarah Banggai secara sepintas lalu, belum mencakup sebagian besar peristiwa-peristiwa lain yang akan diungkapkan pada masa mendatang, dan perlawanan terhadap penjajah dalam segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat terhadap penjajah, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perlawanan sikap.

Dalam buku ini menceritakan tentang seluruh daerah Luwuk Banggai yaitu semua daerah-daerah di Ujung Timur Sulawesi Tengah, yang kini disebut Kabupaten Banggai dengan ibu kota Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ibu kota Salakan, dan Kabupaten Banggai Laut dengan ibu kota Banggai. Sehingga dalam buku ini menceritakan secara kilas tentang sejarah Banggai secara umum.<sup>18</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, yakni pendekatan ilmu kesejarahan adalah membuat suatu gambaran, peristiwa masa lampau, peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejarah Desa Sampaka di

---

<sup>17</sup> Haryanto Djalumang, 2012, *Sejarah Kabupaten Banggai* Jakarta ; Rajawali Pres

<sup>18</sup> H.S Padeatu, SH. 2005. *Sepintas Kilas Sejarah Banggai serta Perlawanan terhadap Penjajah Belanda dan Jepang di Daerah Luwuk Banggai*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Banggai Kepulauan. Adapun sasaran dalam pendekatan sejarah berpatokan pada pendapat para ahli, yakni dapat dilihat dari pengertian sejarah berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut :

Menurut Nouruzzanan Shiddiqie dalam Moeflih Hasbullah mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa masa lampau yang tidak hanya memberi informasi tentang terjadinya peristiwa itu, tetapi juga memberikan interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat hukum sebab akibat<sup>19</sup>.

Menurut R.Moh.Ali dalam Dedi Supriyandi mengemukakan pengertian sejarah mengacu dalam tiga makna yaitu: (1) Sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa kenyataan, (2) Cerita tentang perubahan, kejadian, atau peristiwa realita, (3) Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa realitas.<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut Daliman mengatakan bahwa sejarah dalam pengertian sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat atau ciri-ciri *einmalig* dan *unik*. *Einmalig*, berarti sekali terjadi. Setiap peristiwa hanya sekali terjadi dan tak akan pernah terulang kembali. Sedangkan sifat *unik* menunjukkan sebagai peristiwa satu-satunya yang berarti tidak ada dua-duanya. Maka peristiwa sejarah selalu khusus. Sejarah dalam pengertian ini adalah sejarah dalam pengertian *objektif*, artinya sejarah sebagai peristiwa itu adalah sesuai dan sama dengan yang ada dalam alam.<sup>21</sup>

Kemudian menurut M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis

---

<sup>19</sup> Moeflih Hasbullah, 2012, *Filsafat Sejarah*, Bandung: Pustaka setia, hlm 22

<sup>20</sup> Dedi Supriyandi, 2012, *Filsafat Sejarah*, Bandung: Pustaka setia, hlm 23

<sup>21</sup> Daliman, 2012, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm 1-2

keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi dimasa lampau.<sup>22</sup>

Menurut Sartono Kartodidjo, dalam Dedi Supriyandi berpendapat bahwa sejarah dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sejarah mentalitas, sejarah sosial dan sejarah struktural.<sup>23</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan multidimensional atau *social scientific*. Menurut Sartono kartodirdjo bahwa multidimensional merupakan pendekatan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dipinjam dari ilmu-ilmu sosial, karena dalam suatu peristiwa sejarah terdapat didalamnya berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial yaitu menyoroti tentang pemerintahan, ekonomi dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Sehingga multidimensional merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode histori, yang menggambarkan peristiwa masa lampau secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data sejarah, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Heuristik**

Kegiatan penelitian sejarah di desa Sampaka, akan diawali dengan pengumpulan sumber sejarah, yang dalam penelitian sejarah disebut sebagai *heuristik*. Adapun yang menjadi kategori sumber penelitian sejarah, yakni :

---

<sup>22</sup> M. Dien Madjid , 2014, *Ilmu Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 8

<sup>23</sup> Dedi Supriyandi, 2012, *Filsafat Sejarah*, Bandung: Pustaka setia, hlm 23

<sup>24</sup> Johan Wahyudhi, 2014, *Ilmu Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 196-197

Sumber kebendaan atau material yaitu sumber sejarah yang berupa benda yang dapat dilihat secara fisik. Sumber ini dapat dibedakan mejadi sumber tertulis, seperti dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, dan *file*. Sumber fisik berikutnya adalah berupa benda artefak seperti, keramik, alat rumah tangga, senjata, alat pertanian atau berburuh, lukisan, dan perhiasan.

Sumber non-kebendaan atau *immaterial* dapat berupa tradisi, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya Sumber lisan berupa kesaksian, hikayat, tembang, dan kidung.

Adapun yang ditemukan dalam pencaharian sumber yakni sumber lisan berupa wawancara denagan para pemerhati sejarah, atau tradisi lisan berupa cerita rakyat, yang bersifat turun temurun, serta sumber artefak berupa benda-benda peninggalan sejarah, sumber non-kebendaan berupa tradisi, agama, dan kepercayaan masyarakat desa sampaka.

## **2. Kritik Sumber**

Semua sumber yang telah terkumpul tersebut berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik baik yang berupa *intern* maupun *ekstern*.

Kritik *intern* dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengangkat kebenaran suatu peristiwa sejarah. Sedangkan kritik *ekstern* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan berupa kertas atau

tinta apakah cocok dengan masa dimana bahan seperti itu biasa digunakan atau diproduksi. Memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan. Apakah itu hasil penulisan ulang atau photo copy.

### **3. Interpretasi**

Adapun interpretasi dalam penelitian ini membandingkan antara sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini. Sumber primer misalnya seperti dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, dan *file*. Sumber sekunder berupa wawancara dengan para pemerhati sejarah, atau cerita rakyat mengenai sejarah desa sampaka yang bersifat turun temurun, serta sumber artefak berupa benda-benda peninggalan sejarah di Desa Sampaka.

### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah setelah melakukan fase heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Kegiatan ini diawali dengan penafsiran dilanjutkan dengan penjelasan dan penyajian. Adapun yang disajikan disini adalah hal-hal yang terkait dengan sumber yang dimiliki oleh peneliti dalam menyusun tulisan ini, terkait atau masuk dalam ruang lingkup kajian, sejarah desa sampaka. Interpretasi dilakukan dengan memberikan makna atas simbol-simbol sejarah melalui metode atau cara *verstehen* (penghayatan) maupun dengan mencari hubungan sebab akibat. Penjelasan dilakukan baik secara naratif ataupun analisis sintensis (menguraikan dan menyatukan) dengan menggunakan bahasa populer atau bahasa yang digunakan sehari, terutama bahasa yang digunakan dalam aktifitas akademik. Selanjutnya penjelasan hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini berjudul “*Sejarah Desa Sampaka di Banggai Kepulauan*” ini penulisannya disusun dalam lima Bab. Setiap bagian memiliki permasalahan-permasalahan tertentu yang saling berkaitan.

Bab. I berisi Pengantar, Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II merupakan Pembentukan Desa Sampaka Tahun 1977-2014, Kondisi Geografis Desa Sampaka, Pendapatan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama, Perubahan Nama Desa Sampaka, Perkembangan Pemerintah Desa Sampaka, Pembangunan Desa Sampaka dan Interaksi Masyarakat Desa Sampaka.

Bab. III menjelaskan Desa Sampaka dan Tradisi, Musik Tradisional, Tarian Tradisional, Alat Musik Tradisional, Senjata Tradisional, dan Makanan Tradisional.

Bab. IV membahas Desa Sampaka Dalam Mitos Masyarakat, Mitos Larangan Bersiul di Malam Hari, Mitos Ayam Berkokok di Tengah Malah, Mitos Menabrak Kucing dalam Melakukan Perjalanan Dengan Kendaraan, Mitos Hujan Panas Terus Menerus, Mitos Kupu-Kupu di Dalam Rumah, dan Mitos Larangan Suami atau Tamu Duduk di Depan Pintu Saat Istri Sedang Hamil.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.